



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2021 SEKRETARIAT DPRD



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 60 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2018 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140).
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.

12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2021 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2021.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2021.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra PD

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2021 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2021 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2021.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 5 Agustus 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020 NOMOR 60



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Organisasi Perangkat Daerah, pada tahun 2020 ini menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan OPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan komitmen dan dukungan semua pihak yang terkait, semoga pelaksanaan tugas yang diemban Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berjalan dengan sukses dan lancar dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel.....	iii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang.....	I-1	
1.2 Landasan Hukum	I-5	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-7	
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-7	
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD.....	II-1	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	II-17	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.....	II-20	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-25	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-54	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD.....	III-2	
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-4	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....		IV-1
BAB V PENUTUP.....		V-1



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kalender penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2021.....	I-2
Tabel T-C.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s.d Tahun 2019 Kabupaten Lima PuluhKota.....	II-2
Tabel T-C.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-18
Tabel T-C.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.....	II-27
Tabel T-C.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.....	II-39
Tabel T-C.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021.....	II-54
Tabel 3.1	Program dan Kegiatan Yang Ada Pada Setiap OPD	III-5
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Kesekretariatan	III-7
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Pengembangan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	III-7
Tabel 3.4	Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Berdasarkan Permendagri nomor 90 Tahun 2019	III-9
Tabel T-B.36	Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten	III-13



Tabel T-C.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat
DPRD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006..... IV-2

Tabel T-C.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat
DPRD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.....IV-10





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2021, Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Sekretariat DPRD sebagai berikut:

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan Rancangan Akhir;
- VI. Penetapan.



I. **Persiapan penyusunan Renja Sekretariat DPRD**, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun Kalender Penyusunan Renja Sekretariat DPRD dengan berpedoman kepada Kalender Perencanaan RKPD dan Renja OPD Tahun 2021 yang telah disusun oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota dan diserahkan ke OPD-OPD tanggal 10 Oktober 2019 dalam rapat Persiapan dan Agenda Perencanaan Tahunan Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021. Adapun jadwal disusun dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kalender Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2021

No	Jenis Tahapan	Waktu	Ket
A	Persiapan Penyusunan		
1	Penyusunan kalender Renja Sekretariat DPRD	Minggu III bulan Oktober 2019	
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja		
1	Penyusunan Ranwal Renja berdasarkan surat permintaan Ranwal Renja OPD dan RKA	Minggu III Bulan Oktober 2019	
2	Penyampaian Ranwal OPD ke Bapelitbang	Minggu IV Bulan November 2019	
3	Penyempurnaan ranwal berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Minggu IV Bulan Januari 2020	
4	Penyampaian rancangan awal renja yang memuat rumusan kegiatan dan /atau kegiatan baru dalam forum Perangkat Daerah /lintas PD	Minggu IV Bulan Januari 2020	
C	Pelaksanaan Forum Daerah/Lintas Perangkat Daerah		
1	Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah	Minggu IV Bulan Januari - Minggu II Bulan Februari 2020	
D	Penyusunan Rancangan Renja		
1	Penyampaian Rancangan Renja kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD	Minggu I bulan Februari 2020	



2	Menyempurnakan Rancangan Renja OPD berdasarkan hasil forum perangkat daerah	Minggu II Bulan Februari 2020	
3	Menyampaikan Renja yang telah disempurnakan ke Bapelitbang	Minggu III Bulan Februari 2020	
4	Verifikasi Renja oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja Sekretariat DPRD sudah selaras dengan rancangan awal RKPD	Minggu III Bulan Februari 2020	
5	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi	Minggu IV Bulan Februari 2020	
6	Penyampaian kembali rancangan renja yang telah disempurnakan kepada Bapelitbang	Minggu IV bulan Februari 2020	
7	Penyempurnaan Renja OPD berdasarkan Berita acara verifikasi renja	Minggu I Bulan Maret 2020	
8	Penyampaian kembali Renja yang telah disempurnakan ke Bapelitbang	Minggu I Bulan Maret 2020	
E	Perumusan Rancangan Akhir Renja		
1	Penyempurnaan Renja berdasarkan Berita Acara Verifikasi Renja	Minggu I Bulan Maret 2020	
2	Penyampaian kembali Renja yang telah disempurnakan ke Bapelitbang	Minggu I bulan Maret 2020	
F	Penetapan Renja		
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir renja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada RKPD	Minggu II bulan Juli 2020	
2	Verifikasi rancangan akhir Renja	Minggu II bulan Juli 2020	
3	Penyempurnaan rancangan akhir Renja berdasarkan hasil verifikasi oleh Bapelitbang	Minggu III bulan Juli 2020	
4	Penyempurnaan rancangan akhir Renja berdasarkan Perkada tentang RKPD	Minggu IV bulan Juli 2020	

II. Penyusunan Rancangan Awal Renja

Pada minggu III November 2019 mulai dilakukan penyusunan rancangan awal Renja Sekretariat DPRD 2021 oleh Kasubag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD dengan berkoordinasi dengan Sekretaris DPRD dan seluruh bagian-bagian dilingkungan Sekretariat DPRD. Penyusunan berpedoman pada Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 dan hasil evaluasi Renja tahun 2019.



Penyusunan rancangan awal Renja Sekretariat DPRD mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Renja merupakan Rancangan Awal Renja yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rancangan Renja Sekretariat DPRD kemudian dibahas dan disempurnakan dalam Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah . Penyajian Rancangan Renja Sekretariat DPRD disajikan dengan sistematika yang sama dengan rancangan awal Renja.

Selanjutnya, Rancangan Renja yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Bapelitbang untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Berdasarkan hasil verifikasi dari tim di Bapelitbang, maka Rancangan Renja disempurnakan dan hasil penyempurnaannya disampaikan kembali ke Bapelitbang.

IV. Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah

Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja



Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

V. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD.

VI. Penetapan

Dalam hal penetapan Renja, Sekretariat DPRD menyerahkan Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang Kab.Lima Puluh Kota untuk diverifikasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025.
7. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.



16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Sekretariat DPRD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2021 sesuai dengan urusan dan kewenangan Sekretariat DPRD.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD untuk tahun 2021.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Sekretariat DPRD ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2021.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat DPRD dan bagian - bagian di Sekretariat DPRD.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD pada tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPR Tahun 2021 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Sekretariat DPRD, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu



Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan sebagainya.

III. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2021.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat program, kegiatan , target capaian kinerja dan pagu indikatif

V. Penutup

Berisi ketentuan penutup.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2019 dan realisasi Renstra Sekretariat DPRD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan 3 kondisi diatas, pada bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Sekretariat DPRD. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019 disajikan Tabel T-C.1 sebagai berikut:



Tabel T-C.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2019 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2019
Kabupaten Lima Puluh Kota**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran	90%	39,3%	90%	90%	100%	90%	80%	80%
0.00.00.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk kebutuhan surat menyurat dalam satu tahun	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
		Jumlah pengadaan materai dalam satu tahun	Materai 6000:6750 Materai 3000:5652	Materai 6000:2450 .materai 3000:2450	Materai 6000:1400 Materai 3000:1.200	Materai 6000: 1300 Materai 3000: 1194	95,9%	Materai 6000:1700 Materai 1001	Materai 6000:5450 materai 3000:4654	88,29%
0.00.00.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk pembayaran rekening telepon ,listrik, air dan internet dalam satu tahun	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
		Jumlah kali pembayaran rekening	240 kali	96 kali	48 kali	48 kali	100%	48 kali	192 kali	80%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
		telepon ,listrik, air dan internet dalam satu tahun								
0.00.00.01.04.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan general check up	175 orang	70 orang	35 orang	25 orang	71,4%	35 orang	140 orang	80%
0.00.00.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk pembayaran honor dalam satu tahun	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48bulan	80%
0.00.00.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk kebutuhan pengadaan alat kebersihan dalam satu tahun	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
		Jumlah bulan pengadaan jasa cleaning service	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
0.00.00.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk ATK dalam satu tahun	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48bulan	80%
0.00.00.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan yang dipenuhi kebutuhan cetak dan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
		penggandaannya								
		Jumlah lembar penggandaan dalam satu tahun	1.300.000 lembar	448.382 lembar	526.257 lembar	437.749 lembar	83%	180.000 lembar	1.063.131 lembar	81,8%
0.00.00.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48bulan	80%
0.00.00.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan pengadaan bahan bacaan dan buku perundang-undangan yang di adakan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
0.00.00.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan kebutuhan belanja makanan minuman dalam satu tahun	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
		Jumlah porsi makan minum harian yang disediakan dalam satu tahun	18.000 porsi	8243 porsi	4228 porsi	3806 porsi	90%	4300 porsi	16.349 porsi	90,8%
		Jumlah porsi makan minum tamu yang	30.000 porsi	12.478 porsi	6.434 porsi	5790 porsi	90%	6355 porsi	24623 porsi	82%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
		disediakan dalam satu tahun								
		Jumlah bulan kebutuhan belanja makan minum rumah dinas Ketua DPRD dalam satu tahun	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
0.00.00.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan kebutuhan penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam setahun yang dipenuhi	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
0.00.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	40%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
0.00.00.02.08.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah bulan kebutuhan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80 %
0.00.00.02.20.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah	Jumlah bulan kebutuhan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
	jabatan/dinas	pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas								
0.00.00.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80 %
0.00.00.02.23.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80 %
0.00.00.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80 %
0.00.00.03.	Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur	Persentase pengadaan pakaian dinas bagi anggota DPRD dan Aparatur	100%	23,3%	100%	100%	98,5%	100%	71,7%	71,7%
0.00.00.03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	Jumlah bulan kebutuhan pengadaan pakaian dinas	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
		Jumlah stel pengadaan pakaian dinas	1630 stel	380 stel	325 stel	200 stel	98,5%	470 stel	1170 stel	71,7%
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur	80%	38,7%	100%	96%	96%	100%	61,3%	78,7%
0.00.00.05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	75 orang	23 orang	15 orang	15 orang	100%	8 orang	46 orang	61,3%
0.00.00.05.03.	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	42 Orang	13 orang	10 orang	9 orang	90%	4 orang	26 orang	61.9%
0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	40%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
0.00.00.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 dokumen	10 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	16 dokumen	80%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
	SKPD									
0.00.00.06.02.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80%
0.00.00.06.03.	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80%
0.00.00.06.04.	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80%
	Sekretariat									
4.00.01.23.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase kelancaran penyampaian informasi kegiatan DPRD ke masyarakat	85%	40%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
4.00.01.23.01.	Penyusunan Sistem Informasi Layanan Publik	Jumlah bulan pembayaran untuk layanan informasi ke masyarakat	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
		Jumlah bulan Pembayaran langganan media massa/ media cetak dan elektronik , biaya berita pariwisata, dan biaya peliputan media cetak dan elektronik	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
4.00.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketersediaan dokumentasi buku perundangan-undangan dan tenaga ahli fraksi	90%	40%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
4.00.01.26.01.	Koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan perundangan	Jumlah bulan pembayaran honor Tenaga Ahli Fraksi dalam satu tahun	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
		Jumlah orang tenaga ahli fraksi DPRD	40 orang	16 orang	8 orang	8 orang	100%	8 orang	36 orang	80%
4.00.01.26.05.	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan kebutuhan cetak buku aturan perundang-undangan dalam satu tahun	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
	Sekretariat DPRD									
4.00.02.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan yang mendukung pada peningkatan kapasitas anggota DPRD	95%	40%	90%	80%	80%	90%	80%	80%
4.00.02.15.01.	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Ranperda yang dibahas dalam satu tahun	66 Ranperda	25 Ranperda	13 Ranperda	10 Ranperda	76,9%	18 Ranperda	53 Ranperda	80,3%
4.00.02.15.02.	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, tokoh agama	Jumlah bulan kebutuhan dialog / hearing yang dilaksanakan dalam satu tahun	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
		Jumlah dialog / hearing yang dilaksanakan dalam satu tahun	20 kali	4 kali	8 kali	8 kali	100%	4 kali	16 kali	80%
4.00.02.15.03.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
		tahun								
		Jumlah terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	500 kali	180 kali	100 Kali	97 kali	97%	100 kali	377 kali	75,4%
4.00.02.15.04.	Rapat-rapat paripurna	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat paripurna dalam satu tahun	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
		Jumlah terlaksananya rapat-rapat paripurna dewan dalam satu tahun	150 kali	49 kali	30 kali	27 kali	90%	30 kali	109 kali	72,7%
4.00.02.15.05.	Kegiatan Reses	Jumlah terlaksana kegiatan reses anggota DPRD ke daerah pemilihan dalam satu tahun	15 kali	6 kali	3 kali	3 kali	100%	3 kali	12 kali	80%
4.00.02.15.06.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah frekuensi kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam satu tahun	45 kali	18 kali	9 kali	9 kali	100%	9 kali	36 kali	80%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 5 + 7 + 9	11 = (10 / 4)
4.00.02.15.07.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah frekuensi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam satu tahun	220 kali	88	44 kali	44	100%	44 bulan	176 kali	80%



Berdasarkan tabel T-C.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Program dan kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Adapun program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program **Pelayanan Administrasi Perkantoran**, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

2. Program **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:

- Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas
- Pemeliharaan Rutin / Berkala rumah dinas/jabatan



- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
3. Program **Peningkatan Disiplin Aparatur**, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100 %, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program **Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100 %, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6. Program **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah



sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:

- Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

7. Program **Penataan Peraturan Perundang-Undangan**, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:

- Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang Undangan
- Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

8. Program **Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:

- Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama
- Rapat - Rapat alat Kelengkapan Dewan
- Rapat - Rapat Paripurna
- Kegiatan Reses
- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

II. Program dan kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program dan kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program **Pelayanan Administrasi Perkantoran**, direncanakan target pencapaiannya sebesar 35 orang, realisasi pencapaiannya



adalah sebesar 25 orang, sehingga tingkat realisasinya adalah sebesar 71,4%. Adapun kegiatan yang belum tercapai targetnya antara lain:

- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan PNS, tidak tercapainya target realisasinya sebesar 100 disebabkan tidak semua anggota DPRD yang berjumlah 35 orang mau mengikuti *medical check up*.

2. Program **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** direncanakan target pencapaiannya sebesar 10 orang, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 9 orang, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 90%. Adapun kegiatan yang belum tercapai targetnya antara lain:

- Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Pada kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan, tidak tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya kenaikan biaya kontribusi untuk mengikuti Bimtek Asdeski sehingga berdampak pada pengurangan peserta.

3. Program **Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah** direncanakan target pencapaiannya 13 Ranperda untuk dibahas, realisasi pencapaiannya adalah 10 Ranperda sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 76,9%. Adapun kegiatan yang belum tercapai targetnya antara lain:

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pada kegiatan Pembahasan Ranperda, tidak tercapainya realisasi pembahasan Ranperda sebanyak 13 Ranperda disebabkan



kurangnya Ranperda yang diajukan Pemerintah Daerah ke DPRD maupun inisiatif DPRD itu sendiri untuk dibahas.

III. Program dan kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tidak ada program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Bila disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan peraturan perundang-undangan diatas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait sesuai yang ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 sehingga tidak ada penjelasan dalam tabel T-C.2



Tabel T-C.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK KD dalam RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah/RPJMD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretaris DPRD
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah/RPJMD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Limapuluh Kota terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi	80%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	85%	80%	82,85%	90%	90%	



		kegiatan(%)													
	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	50	51	55	60	65	70	-	-	-	-	-	-	

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target pencapaian indikator kinerja utama Sekretaris DPRD berupa indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD Lima Puluh Kota terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan telah mencapai target yang diinginkan bahkan ada yang melebihi target yang dituju yakni pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2019 berdasarkan hasil survey kepuasan yang dilakukan terhadap 35 orang anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Sementara itu nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 belum ada penilaian dari pejabat yang berkompeten dalam memberikan penilaian kinerja yakni pihak Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap *stakeholdersnya*
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2019

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2019 sudah cukup optimal. Hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa upaya antara lain:

1. Pelayanan terhadap kegiatan rapat-rapat DPRD

Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelayanan rapat-rapat DPRD secara umum sudah dilakukan secara maksimal . Ini terbukti setiap jadwal rapat / persidangan yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir persidangan mulai dari penyiapan administrasi rapat, konsumsi sampai risalah telah dilakukan secara maksimal.

2. Pelayanan terhadap kegiatan kunjungan kerja anggota DPRD

Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Kunjungan Kerja DPRD



secara umum sudah dilakukan secara maksimal. Ini terbukti setiap jadwal kunjungan kerja yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir kegiatan kunjungan kerja DPRD mulai dari penyiapan administrasi Kunjungan Kerja, mendampingi langsung ke lapangan, penyusunan laporan kunjungan kerja DPRD serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya

3. Pelayanan terhadap kegiatan Bimbingan Teknis DPRD

Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan Bimbingan Teknis anggota DPRD secara umum sudah dilakukan secara maksimal . Ini terbukti setiap jadwal Bimtek yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir kegiatan Bimtek DPRD mulai dari penyiapan administrasi Bimtek, mendampingi langsung kegiatan Bimtek, penyusunan laporan kegiatan Bimtek DPRD serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kegiatan Bimtek yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya.

4. Pelayanan terhadap kegiatan Reses Anggota DPRD ke daerah pemilihannya.

Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan Reses anggota DPRD secara umum sudah dilakukan secara maksimal . Ini terbukti setiap jadwal Reses yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir kegiatan Reses DPRD mulai dari penyiapan administrasi Reses, mendampingi langsung kegiatan Reses, penyusunan laporan kegiatan Reses DPRD serta menyiapkan



laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kegiatan Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya.

5. Memanfaatkan media sosial untuk kelancaran komunikasi dengan Anggota DPRD seperti melalui *Whatsapp group*.

Selain itu keberhasilan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2019 sudah cukup optimal didapat dari hasil tanya jawab berupa kuisisioner dengan seluruh anggota DPRD, dimana untuk tahun 2019 ini, dari 35 orang anggota DPRD, 29 orang (82,85%) diantaranya menyatakan puas atas pelayanan-pelayanan kegiatan administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk Informasi, ukuran dan skala pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan dengan teknik analisis data berupa kuisisioner.

Namun demikian, upaya-upaya sebagaimana dimaksud diatas bukan berarti tanpa kelemahan, antara lain:

1. Belum semua ASN maupun Tenaga Harian Lepas dilingkungan Sekretariat DPRD yang memahami sepenuhnya tugas dan tanggungjawabnya sehingga adakalanya terjadi miskomunikasi dengan anggota DPRD.
2. Belum semua ASN maupun Tenaga Harian Lepas dilingkungan Sekretariat DPRD yang mempunyai sumber daya yang memadai sehingga memperlambat pelaksanaan tugas anggota DPRD.
3. Adanya sebagian dari ASN maupun Tenaga Harian Lepas dilingkungan Sekretariat DPRD terutama yang langsung terkait dengan pelayanan persidangan setengah hati melayani anggota



DPRD sehingga berdampak pada ketidaknyamanan hubungan antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD itu sendiri.

4. Masih kurangnya sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan persidangan seperti sound sistem dan kebersihan ruangan.
5. Dalam hal kebersihan ruang pribadi seperti kamar kecil sering menjadi polemik diantara anggota DPRD sehingga sering menjadi bahan pertanyaan bagi sebagian anggota DPRD didalam berbagai persidangan / rapat DPRD.
6. Persoalan ketersediaan air untuk kebutuhan kantor sampai saat ini masih menjadi masalah bagi anggota DPRD akibat suplay air dari pihak PDAM yang tidak lancar.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota DPRD sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi antar bagian-bagian dilingkungan Sekretariat DPRD dalam melayani seluruh kebutuhan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
2. Lemahnya sumber daya manusia yang mendukung pelayanan terhadap kelancaran tugas anggota DPRD.
3. Adanya ego sektoral masing-masing bagian dilingkungan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Belum optimalnya rasa kebersamaan sesama aparatur dilingkungan Sekretariat DPRD dalam melayani anggota DPRD
5. Kurangnya pemahaman masing-masing personil ASN maun THL terhadap tugas dan fungsinya.
6. Adanya penempatan personil yang tidak sesuai keahliannya dengan tugas yang diembannya.



7. Belum optimalnya partisipasi ASN dan THL dalam mendukung kelancaran tugas anggota DPRD.

Melihat pada permasalahan di atas, dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dimasa mendatang, tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tahun 2016-2021. Sekretariat DPRD merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan tujuannya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas serta sasarannya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Merunut pada permasalahan yang ada, untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD di masa mendatang, tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam beberapa tahun mendatang adalah:

- Semakin strategisnya peran Sekretariat DPRD dalam pelayanan terhadap DPRD sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam memfasitasi kegiatan DPRD baik dalam persidangan/rapat maupun kegiatan yang terkait dengan reses, kunjungan kerja dan penyelenggaraan bimbingan teknis.
- Perubahan kebijakan perencanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*;
- Meningkatnya tuntutan anggota DPRD terhadap pelayanan yang maksimal, cepat dan tepat waktu.
- Arus Informasi yang semakin cepat dan penggunaan berbagai aplikasi teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi ASN maupun THL dalam memfasitasi berbagai kebutuhan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
- Penyediaan lahan parkir kantor yang layak dan memadai untuk anggota DPRD dan tamu yang berkunjung ke kantor Sekretariat DPRD.



Sedangkan peluang bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya adalah:

- Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan system layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Memperluas jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal untuk memfasilitasi kebutuhan informasi anggota DPR
- Adanya peluang meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dalam ruangan persidangan berupa peralatan sound sistem dan konsumsi serta diluar persidangan berupa kegiatan kunjungan kerja, reses dan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dijelaskan juga mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Adapun hasil perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam renja Sekretariat DPRD terlihat bahwa ada penambahan kegiatan yang tidak tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 untuk mensikronkan dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodevikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



yakni kegiatan :

- Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
- Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 berdasarkan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel T-C.3 di bawah ini.



Tabel T-C.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Berdasarkan Permendagri nomor 13 Tahun 2006
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran		95 %	3.159.001.26.900,-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran		95 %	3.159.001.26.900,-	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk kebutuhan surat menyurat dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	15.103.810,-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk kebutuhan surat menyurat dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	15.103.810,-	
		Jumlah pengadaan materai dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	Materai 6000 : 1800 bh Materai 3000 : 1100	-		Jumlah pengadaan materai dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	Materai 6000 : 1800 bh Materai 3000 : 1100	-	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk pembayaran rekening telepon ,listri, air dan internet dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	279.475.000,-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk pembayaran rekening telepon ,listri, air dan internet dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	279.475.000,-	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
		Jumlah kali pembayaran rekening telepon ,listrik,air dan internet dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	48 Kali	-		Jumlah kali pembayaran rekening telepon ,listrik air dan internet dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	48 Kali	-	
3	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan general check up	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	35 orang	52.500.000,-	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan general check up	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	35 orang	52.500.000,-	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk pembayaran honor dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	569.150.000,-	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk pembayaran honor dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	569.150.000,-	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk kebutuhan pengadaan alat kebersihan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	271.975.459,-	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk kebutuhan pengadaan alat kebersihan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	271.975.459,-	
		Jumlah bulan pengadaan jasa cleaning service	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	-		Jumlah bulan pengadaan jasa cleaning service	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	-	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk ATK dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	85.000.000,-	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk ATK dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	85.000.000,-	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan yang dipenuhi kebutuhan cetak dan penggandaannya	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	90.000.000,-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan yang dipenuhi kebutuhan cetak dan penggandaannya	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	90.000.000,-	
		Jumlah lembar penggandaan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	550.028 Lembar	-		Jumlah lembar penggandaan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	550.028 Lembar	-	
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	1.101.240.000,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	1.101.240.000,00	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bulan pengadaan bahan bacaan dan buku perundang-undangan yang di adakan	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	39.300.000,-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan pengadaan bahan bacaan dan buku perundang-undangan yang di adakan	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	39.300.000,-	
10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan kebutuhan belanja makanan minuman dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	291.815.000,-	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan kebutuhan belanja makanan minuman dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	291.815.000,-	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
		Jumlah porsi makan minum tamu yang disediakan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	7.956 Porsi	-		Jumlah porsi makan minum tamu yang disediakan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	7.956 Porsi	-	
		Jumlah bulan kebutuhan belanja makan minum rumah dinas Ketua DPRD dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	-		Jumlah bulan kebutuhan belanja makan minum rumah dinas Ketua DPRD dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	-	
		Jumlah OH Honor THL Sub.Bagian TU, Kepegawaian dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	2112 OH	-		Jumlah OH Honor THL Sub.Bagian TU, Kepegawaian dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	2112 OH	-	
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan kebutuhan penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam setahun yang dipenuhi	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	363.442.000,-	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan kebutuhan penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam setahun yang dipenuhi	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	363.442.000,-	
		Jumlah OH honor THL yang dibayarkan dalam setahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	720 OH	-		Jumlah OH honor THL yang dibayarkan dalam setahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	720 OH	-	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		90 %	3.166.480.000,-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		90 %	3.166.480.000,-	
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Unit	413.300.000,-	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Unit	413.300.000,-	
2	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah paket pengadaan peralatan rumah dinas	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	508.500.000,-	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah paket pengadaan peralatan rumah dinas	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Paket	508.500.000,-	
3	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas	Jumlah paket pemeliharaan rumah jabatan/dinas	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	434.400.000,-	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas	Jumlah paket pemeliharaan rumah jabatan/dinas	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Paket	434.400.000,-	
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan gedung kantor	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	560.280.000,-	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan gedung kantor	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Paket	560.280.000,-	
5	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan pimpinan	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	250.000.000,-	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan pimpinan	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 paket	250.000.000,-	
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas/Operasional	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	400.000.000,-	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas/Operasional	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 paket	400.000.000,-	
7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pekerjaan rehab gedung kantor	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Paket	600.000.000,-	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pekerjaan rehab gedung kantor	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Paket	600.000.000,-	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
III	Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur	Persentase anggota DPRD dan Aparatur yang disiplin dalam berpakaian dinas sesuai ketentuan berlaku	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	95%	501.750.000,-	Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur	Persentase anggota DPRD dan Aparatur yang disiplin dalam berpakaian dinas sesuai ketentuan berlaku	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	95%	501.750.000,-	
1	Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	Jumlah stel pengadaan pakaian dinas	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	455 stel	501.750.000,-	Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	Jumlah stel pengadaan pakaian dinas	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	455 stel	501.750.000,-	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur		90%	195.000.000,-	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur		90%	195.000.000,-	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	38 Orang	95.000.000,-	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	38 Orang	95.000.000,-	
2	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	20 Orang	100.000.000,-	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	20 Orang	100.000.000,-	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	40.199.500,-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	40.199.500,-	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	4 Dokumen	10.690.000,-	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	4 Dokumen	10.690.000,-	
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Dokumen	9.547.000,-	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Dokumen	9.547.000,-	
3	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Dokumen	8.462.500,-	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Dokumen	8.462.500,-	
4	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Dokumen	11.500.000,-	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Dokumen	11.500.000,-	
	Sekretariat					Sekretariat					
VI	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase kelancaran penyampaian informasi kegiatan DPRD ke masyarakat		90%	854.400.000,-	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase kelancaran penyampaian informasi kegiatan DPRD ke masyarakat		90%	854.400.000,-	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Ke giatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
1	Penyusunan Sistem Informasi Layanan Publik	Jumlah bulan pembayaran untuk layanan informasi ke masyarakat	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	854.400.000,-	Penyusunan Sistem Informasi Layanan Publik	Jumlah bulan pembayaran untuk layanan informasi ke masyarakat	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	854.400.000,-	
		Jumlah bulan Pembayaran langganan media massa/ media cetak dan elektronik , biaya berita pariwisata, dan biaya peliputan media cetak dan elektronik	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	-	-	Jumlah bulan Pembayaran langganan media massa/ media cetak dan elektronik , biaya berita pariwisata, dan biaya peliputan media cetak dan elektronik	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	-	
		Jumlah jenis koran lokal, nasional, dan majalah untuk anggota DPRD dan sekretariat yang menjadi langganan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 jenis	-	-	Jumlah jenis koran lokal, nasional, dan majalah untuk anggota DPRD dan sekretariat yang menjadi langganan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 jenis	-	
		Cetak buletin berita DPRD dalam setahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 edisi	-		Cetak buletin berita DPRD dalam setahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 edisi	-	
VII	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketersediaan dokumentasi buku perundangan-undangan		100%	359.810.000,-	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketersediaan dokumentasi buku perundangan-undangan		100%	359.810.000,-	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
1	Koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan perundangan	Jumlah bulan pembayaran honor Tim ahli AKD dan Tenaga Ahli Fraksi dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	327.440.000,-	Koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan perundangan	Jumlah bulan pembayaran honor Tim ahli AKD dan Tenaga Ahli Fraksi dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	327.440.000,-	
2	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan kebutuhan cetak buku aturan perundang-undangan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	32.370.000,00,-	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan kebutuhan cetak buku aturan perundang-undangan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	32.370.000,00,-	
		Jumlah cetak buku aturan perundang-undangan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 paket			Jumlah cetak buku aturan perundang-undangan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 paket		
	Sekretariat DPRD					Sekretariat DPRD					
VIII	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan yang mendukung pada peningkatan kapasitas anggota DPRD		90%	15.685.050.8400,-	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan yang mendukung pada peningkatan kapasitas anggota DPRD		90%	15.685.050.8400,-	
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	18 Ranperda	3.095.214.880,-	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	18 Ranperda	3.095.214.880,-	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
		Pembuatan naskah akademik Ranperda	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 naskah	-		Pembuatan naskah akademik Ranperda	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 naskah	-	
2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, tokoh agama	Jumlah dialog / hearing yang dilaksanakan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	15 kali	149.600.000,-	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, tokoh agama	Jumlah dialog / hearing yang dilaksanakan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	15 kali	149.600.000,-	
3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	328.273.200,-	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	328.273.200,-	
		Jumlah terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	127 kali	-		Jumlah terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	127 kali	-	
4	Rapat-rapat paripurna	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat paripurna dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	256.787.360,-	Rapat-rapat paripurna	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat paripurna dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	256.787.360,-	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
		Jumlah terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	30 kali	-		Jumlah terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	30 kali	-	
5	Kegiatan Reses	Jumlah terlaksana kegiatan reses anggota DPRD ke daerah pemilihan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 kali	750.395.000,-	Kegiatan Reses	Jumlah terlaksana kegiatan reses anggota DPRD ke daerah pemilihan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 kali	750.395.000,-	
6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah frekuensi kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	9 Kali	4.513.814.400,-	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah frekuensi kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	9 Kali	4.513.814.400,-	
7	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah frekuensi kegiatan peningkatan kapasitas lembaga DPRD dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	44 Kali	6.590.966.000,-	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah frekuensi kegiatan peningkatan kapasitas lembaga DPRD dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	44 Kali	6.590.966.000,-	
						Inpektorat					
IX	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian	Persentase lancarnya penyusunan pelaporan capaian		90%	294.794.000,-	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan	Persentase lancarnya penyusunan pelaporan capaian tindak		90%	294.794.000,-	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
	Pelaksanaan Kebijakan KDH	tindak lanjut hasil temuan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD				pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	lanjut hasil temuan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD				
1	Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah triwulan laporan capaian TLH temuan	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 triwulan	25.658.000,-	Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah triwulan laporan capaian TLH temuan	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 triwulan	25.658.000,-	Perbup Nomor 73 Tahun 2018
2	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	40 orang	243.478.000,-	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	40 orang	243.478.000,-	Perbup Nomor 73 Tahun 2018
3	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah triwulan laporan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 triwulan	25.658.000,-	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah triwulan laporan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 triwulan	25.658.000,-	Perbup Nomor 73 Tahun 2018
	Jumlah				24.129.637.285,-					24.129.637.285,-	



Tabel T-C.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		95 %	10.130.814.226,-	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		95 %	10.130.814.226,-	
	Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan yang terlaksana		95 %	3.356.462.957	Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan yang terlaksana		95 %	3.356.462.957	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan pembayaran gaji dan tunjangan set.DPRD dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	3.316.263.457	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan pembayaran gaji dan tunjangan set.DPRD dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	3.316.263.457	
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	4 Dokumen	10.690.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	4 Dokumen	10.690.000	
3	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Dokumen	9.547.000,-	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Dokumen	9.547.000,-	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
		Semesteran									
4	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis realisasi Anggaran	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Dokumen	8.462.500,-	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis realisasi Anggaran	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Dokumen	8.462.500,-	
5	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	5 Dokumen	11.500.000,-	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	5 Dokumen	11.500.000,-	
	Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum yang terlaksana		95	6.305.351.269,00	Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum yang terlaksana		95	6.305.351.269,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan yang dipenuhi untuk kebutuhan surat menyurat dalam satu tahun	set.DPRD	12 bulan	15.103.810,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan yang dipenuhi untuk kebutuhan surat menyurat dalam satu tahun	set.DPRD	12 bulan	15.103.810,00	
		Jumlah Pengadaan Materai dalam satu tahun	set.DPRD	Materai 6000 : 2000 bh Materai 3000 : 1500 bh	0,00		Jumlah Pengadaan Materai dalam satu tahun	set.DPRD	Materai 6000 : 2000 bh Materai 3000 : 1500 bh	0,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Yang dipenuhi untuk Pembayaran Rekening telepon, listrik, air dan internet dalam satu tahun	set.DPRD	12 bulan	279.475.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Yang dipenuhi untuk Pembayaran Rekening telepon, listrik, air dan internet dalam satu tahun	set.DPRD	12 bulan	279.475.000,00	
		Jumlah Kali Pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet dalam satu tahun	set.DPRD	48 kali	0,00		Jumlah Kali Pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet dalam satu tahun	set.DPRD	48 kali	0,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan yang dipenuhi untuk Pembayaran Honor dalam satu tahun	set.DPRD	12 bulan	569.150.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan yang dipenuhi untuk Pembayaran Honor dalam satu tahun	set.DPRD	12 bulan	569.150.000,00	
		Jumlah OB yang dibayar Honor nya	set.DPRD	15 Orang	0,00		Jumlah OB yang dibayar Honor nya	set.DPRD	15 Orang	0,00	
		Jumlah Hari Kerja THL yang dibayarkan dalam satu tahun	set.DPRD	2268 Hari	0,00		Jumlah Hari Kerja THL yang dibayarkan dalam satu tahun	set.DPRD	2268 Hari	0,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bulan yang dipenuhi untuk kebutuhan pengadaan alat kebersihan dalam satu tahun	set.DPRD	12 Bulan	271.975.459,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bulan yang dipenuhi untuk kebutuhan pengadaan alat kebersihan dalam satu tahun	set.DPRD	12 Bulan	271.975.459,00	
		Jumlah Bulan Pengadaan Jasa Cleaning Service	set.DPRD	12 Bulan	0,00		Jumlah Bulan Pengadaan Jasa Cleaning Service	set.DPRD	12 Bulan	0,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan Yang dipenuhi untuk ATK dalam satu tahun	set.DPRD	12 Bulan	85.000.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan Yang dipenuhi untuk ATK dalam satu tahun	set.DPRD	12 Bulan	85.000.000,00	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan yang dipenuhi kebutuhan cetak dan penggandaannya	set.DPRD	12 Bulan	122.370.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan yang dipenuhi kebutuhan cetak dan penggandaannya	set.DPRD	12 Bulan	122.370.000,00	
		Jumlah jenis barang yang dicetak dalam satu tahun	set.DPRD	12 Jenis	0,00		Jumlah jenis barang yang dicetak dalam satu tahun	set.DPRD	12 Jenis	0,00	
		Jumlah lembar penggandaan dalam satu tahun	set.DPRD	550.028 Lembar	0,00		Jumlah lembar penggandaan dalam satu tahun	set.DPRD	550.028 Lembar	0,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	set.DPRD	12 Bulan	1.101.240.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	set.DPRD	12 Bulan	1.101.240.000,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pengadaan bahan bacaan dan buku perundang-undangan yang di adakan	set.DPRD	12 Bulan	39.300.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pengadaan bahan bacaan dan buku perundang-undangan yang di adakan	set.DPRD	12 Bulan	39.300.000,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan kebutuhan belanja makanan minuman dalam satu tahun	set.DPRD	12 Bulan	291.815.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan kebutuhan belanja makanan minuman dalam satu tahun	set.DPRD	12 Bulan	291.815.000,00	
		Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan dalam satu tahun	set.DPRD	30.480 porsi	0,00		Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan dalam satu tahun	set.DPRD	30.480 porsi	0,00	
		Jumlah porsi makan minum tamu yang disediakan dalam satu tahun	set.DPRD	7.956 porsi	0,00		Jumlah porsi makan minum tamu yang disediakan dalam satu tahun	set.DPRD	7.956 porsi	0,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
		tahun									
		Jumlah bulan kebutuhan belanja makan minum rumah dinas Ketua DPRD dalam satu tahun	set.DPRD	12 Bulan	0,00		Jumlah bulan kebutuhan belanja makan minum rumah dinas Ketua DPRD dalam satu tahun	set.DPRD	12 Bulan	0,00	
		Jumlah OH Honor THL Sub.Bagian TU, Kepegawaian dalam satu tahun	set.DPRD	2112 OH	0,00		Jumlah OH Honor THL Sub.Bagian TU, Kepegawaian dalam satu tahun	set.DPRD	2112 OH	0,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah bulan kebutuhan penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam setahun yang dipenuhi	set.DPRD	12 Bulan	363.442.000,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah bulan kebutuhan penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam setahun yang dipenuhi	set.DPRD	12 Bulan	363.442.000,00	
		Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi	set.DPRD	751 OH	0,00		Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam	set.DPRD	751 OH	0,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
		dan konsultasi keluar daerah dalam satu tahun					satu tahun				
		Jumlah OH honor THL yang dibayarkan dalam setahun	set.DPRD	720 OH	0,00		Jumlah OH honor THL yang dibayarkan dalam setahun	set.DPRD	720 OH	0,00	
11	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan	set.DPRD	1 unit	413.300.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan	set.DPRD	1 unit	413.300.000,00	
12	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan /Dinas	Jumlah bulan kebutuhan pengadaan peralatan rumah dinas	set.DPRD	12 Bulan	508.500.000,00	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan /Dinas	Jumlah bulan kebutuhan pengadaan peralatan rumah dinas	set.DPRD	12 Bulan	508.500.000,00	
13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan /Dinas	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan rumah jabatan/dinas	set.DPRD	12 bulan	434.400.000,00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan /Dinas	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan rumah jabatan/dinas	set.DPRD	12 bulan	434.400.000,00	
14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	set.DPRD	12 bulan	560.280.000,00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	set.DPRD	12 bulan	560.280.000,00	
15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan	set.DPRD	12 bulan	250.000.000,00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan	set.DPRD	12 bulan	250.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
		kendaraan Jabatan					kendaraan Jabatan				
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/Operasional	set.DPRD	12 bulan	400.000.000,00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/Operasional	set.DPRD	12 bulan	400.000.000,00	
17	Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah pekerjaan rehab gedung kantor	set.DPRD	1 Paket	600.000.000,00	Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah pekerjaan rehab gedung kantor	set.DPRD	1 Paket	600.000.000,00	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		90	469.000.000,00	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		90	469.000.000,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah stel pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	set.DPRD	79 stel	39.500.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah stel pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	set.DPRD	79 stel	39.500.000,00	
2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah stel pengadaan pakaian kerja lapangan	set.DPRD	100 stel	102.000.000,00	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah stel pengadaan pakaian kerja lapangan	set.DPRD	100 stel	102.000.000,00	
3	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah stel pengadaan pakaian KORPRI	set.DPRD	31 stel	15.500.000,00	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah stel pengadaan pakaian KORPRI	set.DPRD	31 stel	15.500.000,00	
4	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah stel pengadaan pakaian Khusus Hari-hari tertentu	set.DPRD	190 stel	117.000.000,00	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah stel pengadaan pakaian Khusus Hari-hari tertentu	set.DPRD	190 stel	117.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
		hari tertentu									
5	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	set.DPRD	38 Orang	95.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	set.DPRD	38 Orang	95.000.000,00	
6	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	set.DPRD	20 Orang	100.000.000,00	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	set.DPRD	20 Orang	100.000.000,00	
II	Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	set.DPRD	95	12.726.038.060,00	Layanan dan Administrasi Keuangan	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	set.DPRD	95	12.726.038.060,00	
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terlaksana		95	585.060.560,00	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terlaksana		95	585.060.560,00	
1	Fasilitas Rapat DPRD	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	set.DPRD	12 Bulan	585.060.560,00	Fasilitas Rapat DPRD	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	set.DPRD	12 Bulan	585.060.560,00	
		Jumlah terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	set.DPRD	127 kali	0,00		Jumlah terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	set.DPRD	127 kali	0,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
		Jumlah OH pembayaran honor THL	set.DPRD	1600 OH	0,00		Jumlah OH pembayaran honor THL	set.DPRD	1600 OH	0,00	
		Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat paripurna dalam satu tahun	set.DPRD	12 Bulan	0,00		Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat paripurna dalam satu tahun	set.DPRD	12 Bulan	0,00	
		Jumlah terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	set.DPRD	30 kali	0,00		Jumlah terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	set.DPRD	30 kali	0,00	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terlaksana		95	12.140.977.500,00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terlaksana		95	12.140.977.500,00	
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan DPRD dalam satu tahun	set.DPRD	12 bulan	11.860.727.500,00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan DPRD dalam satu tahun	set.DPRD	12 bulan	11.860.727.500,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut DPRD	Jumlah stel pengadaan pakaian Dinas dan Atribut DPRD	set.DPRD	175 stel	227.750.000,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut DPRD	Jumlah stel pengadaan pakaian Dinas dan Atribut DPRD	set.DPRD	175 stel	227.750.000,00	
3	Pelaksanaan Medical Check up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan general check up	set.DPRD	35 Orang	52.500.000,00	Pelaksanaan Medical Check up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan general check up	set.DPRD	35 Orang	52.500.000,00	
III	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana		90	16.449.775.956,00	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana		90	16.449.775.956,00	
	Pembentukan Perda dan Peraturan Daerah	Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan daerah dala satu tahun		90	3.095.214.880,00	Pembentukan Perda dan Peraturan Daerah	Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan daerah dala satu tahun		90	3.095.214.880,00	
1	Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dalam satu tahun	set.DPRD	18 Ranperda	3.095.214.880,00	Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dalam satu tahun	set.DPRD	18 Ranperda	3.095.214.880,00	
		Pembuatan naskah akademik Ranperda	set.DPRD	3 Naskah	0,00		Pembuatan naskah akademik Ranperda	set.DPRD	3 Naskah	0,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Yang terlaksana		90	167.945.676,00	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Yang terlaksana		90	167.945.676,00	
1	Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi	set.DPRD	30 orang	116.629.676,00	Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi	set.DPRD	30 orang	116.629.676,00	Perbup Nomor 73 tahun 2018
2	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan	Jumlah triwulan laporan capaian TLH temuan	set.DPRD	3 Triwulan	25.658.000,00	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan	Jumlah triwulan laporan capaian TLH temuan	set.DPRD	3 Triwulan	25.658.000,00	Perbup Nomor 73 tahun 2018
3	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah triwulan laporan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	set.DPRD	3 Triwulan	25.658.000,00	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah triwulan laporan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	set.DPRD	3 Triwulan	25.658.000,00	Perbup Nomor 73 tahun 2018
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana		90	3.752.400.000,00	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana		90	3.752.400.000,00	
1	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah frekuensi kegiatan Bimtek DPRD dalam satu	set.DPRD	6 kali	2.500.000.000,00	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah frekuensi kegiatan Bimtek DPRD dalam satu tahun	set.DPRD	6 kali	2.500.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
		tahun									
2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah bulan pembayaran untuk layanan informasi ke masyarakat	set.DPRD	12 Bulan	854.400.000,00	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah bulan pembayaran untuk layanan informasi ke masyarakat	set.DPRD	12 Bulan	854.400.000,00	
		Jumlah bulan Pembayaran langganan media massa/ media cetak dan elektronik , biaya berita pariwisata, dan biaya peliputan media cetak dan elektronik	set.DPRD	12 Bulan	0,00		Jumlah bulan langganan media massa/ media cetak dan elektronik , biaya berita pariwisata, dan biaya peliputan media cetak dan elektronik	set.DPRD	12 Bulan	0,00	
		Jumlah jenis koran lokal, nasional, dan majalah untuk anggota DPRD dan sekretariat yang menjadi langganan dalam satu tahun	set.DPRD	3 jenis	0,00		Jumlah jenis koran lokal, nasional, dan majalah untuk anggota DPRD dan sekretariat yang menjadi langganan dalam satu tahun	set.DPRD	3 jenis	0,00	
		Cetak buletin berita DPRD dalam setahun	set.DPRD	12 edisi	0,00		Cetak buletin berita DPRD dalam setahun	set.DPRD	12 edisi	0,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah bulan pembayaran honor Tim ahli AKD dalam satu tahun	set.DPRD	12 Bulan	120.000.000,00	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah bulan pembayaran honor Tim ahli AKD dalam satu tahun	set.DPRD	12 Bulan	120.000.000,00	
		Jumlah orang tim ahli AKD DPRD yang honorinya dibayarkan	set.DPRD	2 orang	0,00		Jumlah orang tim ahli AKD DPRD yang honorinya dibayarkan	set.DPRD	2 orang	0,00	
4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah bulan pembayaran honor tenaga ahli fraksi dalam satu tahun	set.DPRD	12 bulan	278.000.000,00	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah bulan pembayaran honor tenaga ahli fraksi dalam satu tahun	set.DPRD	12 bulan	278.000.000,00	
	Penyerapan dan Menghimpun Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Menghimpun Asprasi Masyarakat yang terlaksana		95	1.317.720.000,00	Penyerapan dan Menghimpun Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Menghimpun Asprasi Masyarakat yang terlaksana		95	1.317.720.000,00	
1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah frekuensi kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dalam satu tahun	set.DPRD	360 kali	417.725.000,00	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah frekuensi kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dalam satu tahun	set.DPRD	360 kali	417.725.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dialog / hearing yang dilaksanakan dalam satu tahun	set.DPRD	15 kali	149.600.000,00	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dialog / hearing yang dilaksanakan dalam satu tahun	set.DPRD	15 kali	149.600.000,00	
3	Pelaksanaan Reses	Jumlah terlaksana kegiatan reses anggota DPRD ke daerah pemilihan dalam satu tahun	set.DPRD	3 kali	750.395.000,00	Pelaksanaan Reses	Jumlah terlaksana kegiatan reses anggota DPRD ke daerah pemilihan dalam satu tahun	set.DPRD	3 kali	750.395.000,00	
	Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Fasilitas tugas Pimpinan DPRD dalam setahun		90	8.116.495.400,00	Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Fasilitas tugas Pimpinan DPRD dalam setahun		90	8.116.495.400,00	
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah frekuensi kegiatan koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan anggota DPRD dalam satu tahun	set.DPRD	51 Kali	8.116.495.400,00	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah frekuensi kegiatan koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan anggota DPRD dalam satu tahun	set.DPRD	51 Kali	8.116.495.400,00	
	Jumlah				39.306.628.242					39.306.628.242	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2021 ini secara umum tidak menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, Sekretariat DPRD tidak memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang baik mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Fom OPD, akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sudah diakomodir dalam Renja Sekretariat DPRD. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka tabel usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 tidak ada penjelasannya.

Tabel T-C.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dengan tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan“ dijelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rancangan teknokratik yang disusun oleh Bappenas terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Adapun ke empat pilar tersebut adalah :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga



Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
3. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
7. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Dengan berpedoman pada tema Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 termasuk 7 agenda rancangan Pembangunan Nasional tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD belum terkait langsung dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dimaksud .

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi daerah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan dalam memfasilitasi DPRD



membahas suatu Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun yang merupakan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. Fasilitasi kegiatan dilakukan dalam bentuk penunjang kegiatan Rapat/ Komisi/ Alat Kelengkapan yang dibentuk untuk pembahasan suatu Rancangan Peraturan melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, misi pada RPJMD 2016 – 2021 yang telah direvisi terutama mewujudkan Visi Daerah yang tertuang dalam misi ke 4 (empat) yaitu “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik ”. Untuk menyelaraskan misi RPJMD tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk strategi sesuai dengan peran Sekretariat DPRD. Tahun 2016 – 2021 misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan prima terhadap kegiatan rapat-rapat dan persidangan DPRD.
2. Memberikan pelayanan prima terhadap kunjungan kerja, reses dan penyaluran aspirasi masyarakat oleh pimpinan dan anggota DPRD ;
3. Memberikan pelayanan prima terhadap pelaksanaan konsultasi dan koordinasi pemerintah dan pembangunan oleh pimpinan dan anggota DPRD ;
4. Memberikan pelayanan prima terhadap kegiatan pengembangan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD ;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelenggaraan fungsi dan tugas-tugas DPRD ;
6. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur Sekretariat DPRD dalam pemberian pelayanan prima terhadap pimpinan dan anggota DPRD ;
7. Meningkatkan perencanaan Sekretariat DPRD dalam mendukung pemberian pelayanan prima.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tujuan :



1. Acuan Sekretariat DPRD dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah .
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2021.

Sasaran :

1. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD untuk peningkatan kapasitas kinerja DPRD Lima Puluh Kota.
2. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD bagi keberdayaan alat kelengkapan DPRD Limapuluh Kota.
3. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD bagi penyelenggaraan fungsi pembentukan Perda .
4. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD bagi peningkatan penyelenggaraan fungsi penganggaran yang berpihak kepada masyarakat
5. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD bagi penyelenggaraan fungsi pengawasan yang sistematis dan berkesinambungan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2021 dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Bupati, sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2010, Permendagri No. 21 tahun 2011 serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam hal penetapan Program/Kegiatan pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD adalah terkait dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 dimana sesuai dengan fungsi dan tugas Sekretariat DPRD erat kaitannya dengan pencapaian misi ke-4, yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik”**.

Dari penelaahan terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala



Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dihasilkanlah 8 program Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
7. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
8. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program dan kegiatan di Sekretariat DPRD dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu:

1. Program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin;
2. Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan kesekretariatan
3. Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Ringkasan program dan kegiatan Sekretariat DPRD pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Yang Ada Pada Setiap OPD

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa jaminan Pemeliharaan kesehatan PNS 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor



No	PROGRAM	KEGIATAN
		7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 3. Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. Pendidikan dan pelatihan formal 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
JML	5 Program	25 Kegiatan



Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Kesekretariatan

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1. Koodinasi kerjasama permasalahan perundang-undangan 2. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
JML	2 Program	3 kegiatan

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Pengembangan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, tokoh agama 3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 4. Rapat-rapat paripurna 5. Kegiatan Reses 6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
JML	1 Program	7 Kegiatan

Berdasarkan tiga pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2021 Sekretariat direncanakan akan melaksanakan **8** program dengan **35** kegiatan.



Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodevikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bahwa terdapat beberapa sub kegiatan yang selama ini tidak terakomodir dalam Revisi Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018, Seiring dengan terbitnya Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga muncul jabatan baru yang belum mempunyai program dan kegiatan yang akan dikelola sesuai tugas dan fungsi dijabatannya yakni Kepala Sub. Bagian Fasilitasi Pengawasan maka dalam Rencana Kerja Tahun 2021 diusulkan tambahan 3 (tiga) kegiatan pada program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang belum ada dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 maupun pada Renstra Perubahan yakni :

1. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
2. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.
3. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Dengan demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2021 menjadi 9 (sembilan) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan.

Sedangkan berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodevikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka untuk tahun 2021 untuk Sekretariat DPRD terdiri dari 3 Program, 10 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan.



Tabel 3.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Berdasarkan
Permendagri Nomor 90 tahun 2019

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB.KEGIATAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Administrasi Keuangan.	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 3. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. 4. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran. 5. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
		2. Administrasi Umum	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan listrik. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. 7. Penyediaan Peralatan dan



			<p>Perlengkapan Kantor.</p> <p>8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>9. Penyediaan Makanan dan Minuman.</p> <p>10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah.</p> <p>11. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional.</p> <p>12. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas.</p> <p>13. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan / Dinas.</p> <p>14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.</p> <p>15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan.</p> <p>16. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.</p> <p>17. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor.</p>
		<p>3. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur</p>	<p>1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.</p> <p>2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.</p> <p>3. Pengadaan Pakaian KORPRI.</p> <p>4. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.</p> <p>5. Pendidikan dan Pelatihan</p>



			Formal. 6. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
2	Layanan Administrasi Keuangan	1. Layanan Administrasi DPRD	1. Fasilitas rapat DPRD
		2. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD. 2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD. 3. Pelaksanaan Medical Check up DPRD
3	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
		2. Pengawasan Penyelenggara Pemerintah	1. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum. 2. Pengawasan Tindak Lanjut Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 3. Pengawasan Penggunaan Anggaran.
		3. Peningkatan Kapasitas DPRD	1. Bimbingan Teknis DPRD. 2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan. 3. Penyediaan Kelompok Pakar



			dan tim ahli. 4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.
		4. Penyerapan dan Menghimpun Aspirasi Masyarakat	1. Kunjungan Kerja dalam daerah. 2. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD 3. Pelaksanaan Reses.
		5. Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
JML	3 Program	10 Kegiatan	44 Sub Kegiatan

Terkait dengan identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal Bab II pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dengan demikian pada Sekretariat DPRD tidak terkait langsung Penentuan Program Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga tidak ditemukan adanya permasalahan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Sekretariat DPRD.



Tabel T-B.36

Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interprestasi belum tercapai (<) sesuai(-) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
	-	-	-	-



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Sementara itu Renja 2021 yang disusun juga harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat DPRD 2016-2021.

Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2021 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel T-C.5 berikut:



Tabel T-C.5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran		95 %	3.159.001.26.900,00			95%	3.159.001.26.900,00
0.00.00.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk kebutuhan surat menyurat dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	15.103.810,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	15.103.810,00
		Jumlah pengadaan materai dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	Materai 6000 : 1800 bh Materai 3000 : 1100	-	APBDKAB	RUTIN OPD	Materai 6000 : 2000 bh Materai 3000 : 1500	-
0.00.00.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk pembayaran rekening telepon ,listrik, air dan internet dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	279.475.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	279.475.000,00
		Jumlah kali pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	48 Kali	-	APBDKAB	RUTIN OPD	48 kali	-



0.00.00.01.04.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan general check up	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	35 orang	52.500.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	35 orang	52.500.000,00
0.00.00.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk pembayaran honor dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	569.150.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	569.150.000,00
0.00.00.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk kebutuhan pengadaan alat kebersihan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	271.975.459,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	271.975.459,00
		Jumlah bulan pengadaan jasa cleaning service	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	-	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	-
0.00.00.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk ATK dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	85.000.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulant	85.000.000,00
0.00.00.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan yang dipenuhi kebutuhan cetak dan penggandaannya	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	90.000.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	90.000.000,00
		Jumlah lembar penggandaan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	550.028 Lembar	-	APBDKAB	RUTIN OPD	550.028 Lembar	-
0.00.00.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	1.101.240.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	Lembar	1.101.240.000,00
0.00.00.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bulan pengadaan bahan bacaan dan buku perundang-undangan yang di adakan	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	39.300.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	39.300.000,00
0.00.00.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan kebutuhan belanja makanan minuman dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	291.815.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	291.815.000,00



		Jumlah porsi makan minum tamu yang disediakan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	7.956 Porsi	-	APBDKAB	RUTIN OPD	7.956 Porsi	-
		Jumlah bulan kebutuhan belanja makan minum rumah dinas Ketua DPRD dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	-	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	-
		Jumlah OH Honor THL Sub.Bagian TU, Kepegawaian dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	2112 OH	-	APBDKAB	RUTIN OPD	2112 OH	-
0.00.00.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan kebutuhan penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam setahun yang dipenuhi	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	363.442.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	363.442.000,00
		Jumlah OH honor THL yang dibayarkan dalam setahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	720 OH	-	APBDKAB	RUTIN OPD	720 OH	-
0.00.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		90 %	3.166.480.000,00				3.166.480.000,00
0.00.00.02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Unit	413.300.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	- unit	413.300.000,00
0.00.00.02.08.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah bulan kebutuhan pengadaan peralatan rumah dinas	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	508.500.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	508.500.000,00
0.00.00.02.20.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan rumah jabatan/dinas	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	434.400.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	434.400.000,00
0.00.00.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	560.280.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	560.280.000,00



0.00.00.02.23.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan kendaraan Jabatan	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	250.000.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	250.000.000,00
4.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/Operasional	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	400.000.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	400.000.000,00
0.00.00.02.24.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pekerjaan rehab gedung kantor	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Paket	600.000.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	1 paket	600.000.000,00
0.00.00.03.	Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur	Persentase anggota DPRD dan Aparatur yang disiplin dalam berpakaian dinas sesuai ketentuan berlaku	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	95%	501.750.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	95%	501.750.000,00
0.00.00.03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	Jumlah stel pengadaan pakaian dinas	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	455 stel	501.750.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	455 stel	501.750.000,00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur		90%	195.000.000,00			90%	195.000.000,00
0.00.00.05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	38 Orang	95.000.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	38 Orang	95.000.000,00
0.00.00.05.03.	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	20 Orang	100.000.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	20 Orang	100.000.000,00
0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	40.199.500,00			100%	40.199.500,00
0.00.00.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP, SPIP, LKPJ, Penetapan kinerja Setwan, Laporan	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	4 Dokumen	10.690.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	4 Dokumen	10.690.000,00



		bulanan, Laporan Evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra, Dokumen RKA, RKPA, DPA, serta DPPA							
0.00.00.06.02.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Dokumen	9.547.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	1 dokumen	9.547.000,00
0.00.00.06.03.	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Dokumen	8.462.500,00	APBDKAB	RUTIN OPD	1 Dokumen	8.462.500,00
0.00.00.06.04.	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Dokumen	11.500.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	1 Dokumen	11.500.000,00
	Sekretariat								
4.00.01.23.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase kelancaran penyampaian informasi kegiatan DPRD ke masyarakat		90%	854.400.000,00			90%	854.400.000,00
4.00.01.23.01.	Penyusunan Sistem Informasi Layanan Publik	Jumlah bulan pembayaran untuk layanan informasi ke masyarakat	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	854.400.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	854.400.000,00
		Jumlah bulan Pembayaran langganan media massa/ media cetak dan elektronik, biaya berita pariwisata, dan biaya peliputan media cetak dan elektronik	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	-	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	
		Cetak buletin berita DPRD dalam setahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 edisi	-	APBDKAB	RUTIN OPD	12 edisi	
4.00.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketersediaan dokumentasi buku perundangan-undangan dan		100%	359.810.000,00			100%	359.810.000,00



		pembayaran honor Tenaga ahli fraksi dan Pakar AKD							
4.00.01.26.01.	Koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan perundangan	Jumlah bulan pembayaran honor Tim ahli AKD dan Tenaga Ahli Fraksi dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	327.440.000,00	APBDKAB	Lainnya	12 bulan	327.440.000,00
4.00.01.26.05.	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan kebutuhan cetak buku aturan perundang-undangan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	32.370.000,00	APBDKAB	Lainnya	12 bulan	32.370.000,00
		Jumlah cetak buku peraturan perundang-undangan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 paket	-	APBDKAB	Lainnya	1 paket	-
	Sekretariat DPRD								
4.00.02.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan yang mendukung pada peningkatan kapasitas anggota DPRD		90%	15.685.050.840,00		Kegiatan khusus DPRD	90%	15.685.050.840,00
4.00.02.15.01.	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	18 Ranperda	3.095.214.880,00	APBDKAB	Lainnya	18 Ranperda	3.095.214.880,00
		Pembuatan naskah akademik Ranperda	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 naskah	-	APBDKAB	Lainnya	3 naskah	-
4.00.02.15.02.	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, tokoh agama	Jumlah dialog / hearing yang dilaksanakan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	15 kali	149.600.000,00	APBDKAB	Lainnya	15 kali	149.600.000,00



4.00.02.15.03.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	328.273.200,00	APBDKAB	Lainnya	12 bulan	328.273.200,00
		Jumlah terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	127 kali	-	APBDKAB	Lainnya	127 kali	-
4.00.02.15.04.	Rapat-rapat paripurna	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat paripurna dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	12 bulan	256.787.360,00	APBDKAB	Lainnya	12 bulan	256.787.360,00
		Jumlah terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	30 kali	-	APBDKAB	Lainnya	30 kali	-
4.00.02.15.05.	Kegiatan Reses	Jumlah terlaksana kegiatan reses anggota DPRD ke daerah pemilihan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 kali	750.395.000,00	APBDKAB	Lainnya	3 kali	750.395.000,00
4.00.02.15.06.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah frekuensi kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	9 Kali	4.513.814.400,00	APBDKAB	Lainnya	9 kali	4.513.814.400,00
4.00.02.15.07.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah frekuensi kegiatan peningkatan kapasitas lembaga DPRD dalam satu tahun	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	44 Kali	6.590.966.000,00	APBDKAB	Lainnya	44 kali	6.590.966.000,00
	Inpektorat								
3.00.01.20.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase lancarnya penyusunan laporan capaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD		90%	167.945.676,00			90%	167.945.676,00



3.00.01.20.45	Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah triwulan laporan capaian TLH temuan	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 triwulan	25.658.000,00	APBDKAB	Lainnya	3 triwulan	25.658.000,00
3.00.01.20.07.	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	30 orang	116.629.676,00	APBDKAB	Lainnya	30 orang	116.629.676,00
3.00.01.20.08.	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah triwulan laporan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 triwulan	25.658.000,00	APBDKAB	Lainnya	3 triwulan	25.658.000,00
Total					24.129.637.285,00				24.129.637.285,00



Tabel T-C.5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Kode	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4 2 1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		95	10.130.814.226,00			95	11.650.436.360,00
4 2 1 2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan yang terlaksana		95	3.356.462.957,00			95	3.859.932.401,00
4 2 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan pembayaran gaji dan tunjangan set.DPRD dalam satu tahun	set.DPRD	12 bulan	3.316.263.457,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	3.813.702.976,00
4 2 1 2.02 6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	set.DPRD	4 Dokumen	10.690.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	4 Dokumen	12.293.500,00
4 2 1 2.02 7	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	set.DPRD	1 Dokumen	9.547.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	1 Dokumen	10.979.050,00
4 2 1 2.02 8	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis realisasi Anggaran	set.DPRD	1 Dokumen	8.462.500,00	APBDKAB	RUTIN OPD	1 Dokumen	9.731.875,00
4 2 1 2.02 9	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir	set.DPRD	5 Dokumen	11.500.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	5 Dokumen	13.225.000,00



4	2	1	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan kebutuhan belanja makanan minuman dalam satu tahun	set.DPRD	12 Bulan	291.815.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 Bulan	335.587.250,00
						Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan dalam satu tahun	set.DPRD	30.480 porsi	0,00	APBDKAB	RUTIN OPD	30.480 porsi	0,00
						Jumlah porsi makan minum tamu yang disediakan dalam satu tahun	set.DPRD	7.956 porsi	0,00	APBDKAB	RUTIN OPD	7.956 porsi	0,00
						Jumlah bulan kebutuhan belanja makan minum rumah dinas Ketua DPRD dalam satu tahun	set.DPRD	12 Bulan	0,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 Bulan	0,00
						Jumlah OH Honor THL Sub.Bagian TU, Kepegawaian dalam satu tahun	set.DPRD	2112 OH	0,00	APBDKAB	RUTIN OPD	2112 OH	0,00
4	2	1	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah bulan kebutuhan penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam setahun yang dipenuhi	set.DPRD	12 Bulan	363.442.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 Bulan	417.958.300,00
						Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam satu tahun	set.DPRD	751 OH	0,00	APBDKAB	RUTIN OPD	751 OH	0,00
						Jumlah OH honor THL yang dibayarkan dalam setahun	set.DPRD	720 OH	0,00	APBDKAB	RUTIN OPD	720 OH	0,00



4	2	1	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan	set.DPRD	1 unit	413.300.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	unit	475.295.000,00
4	2	1	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan /Dinas	Jumlah bulan kebutuhan pengadaan peralatan rumah dinas	set.DPRD	12 Bulan	508.500.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	584.775.000,00
4	2	1	2.03	26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan /Dinas	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan rumah jabatan/dinas	set.DPRD	12 bulan	434.400.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	499.560.000,00
4	2	1	2.03	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	set.DPRD	12 bulan	560.280.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	644.322.000,00
4	2	1	2.03	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan kendaraan Jabatan	set.DPRD	12 bulan	250.000.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	287.500.000,00
4	2	1	2.03	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/Operasional	set.DPRD	12 bulan	400.000.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	460.000.000,00
4	2	1	2.03	38	Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah pekerjaan rehab gedung kantor	set.DPRD	1 Paket	600.000.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD		690.000.000,00



4	2	1	2.04		Peningkata Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		90	469.000.000,00			90	539.350.000,00
4	2	1	2.04	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah stel pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	set.DPRD	79 stel	39.500.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	79 stel	45.425.000,00
4	2	1	2.04	3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah stel pengadaan pakaian kerja lapangan	set.DPRD	100 stel	102.000.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	100 stel	117.300.000,00
4	2	1	2.04	4	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah stel pengadaan pakaian KORPRI	set.DPRD	31 stel	15.500.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	31 stel	17.825.000,00
4	2	1	2.04	5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah stel pengadaan pakaian Khusus Hari-hari tertentu	set.DPRD	190 stel	117.000.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	190 stel	134.550.000,00
4	2	1	2.04	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	set.DPRD	38 Orang	95.000.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	38 Orang	109.250.000,00
4	2	1	2.04	11	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	set.DPRD	20 Orang	100.000.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	20 Orang	115.000.000,00
4	2	2			Layanan dan Administrasi Keuangan	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	set.DPRD	95	12.726.038.060,00			95	14.634.943.769,00
4	2	2	2.01		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terlaksana		95	585.060.560,00			95	672.819.644,00
4	2	2	2.01	2	Fasilitas Rapat DPRD	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	set.DPRD	12 Bulan	585.060.560,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 Bulan	672.819.644,00



						Jumlah terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	set.DPRD	127 kali	0,00	APBDKAB	RUTIN OPD	127 kali	0,00
						Jumlah OH pembayaran honor THL	set.DPRD	1600 OH	0,00	APBDKAB	RUTIN OPD	1600 OH	0,00
						Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat paripurna dalam satu tahun	set.DPRD	12 Bulan	0,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 Bulan	0,00
						Jumlah terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	set.DPRD	30 kali	0,00	APBDKAB	RUTIN OPD	30 kali	0,00
4	2	2	2.02		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terlaksana		95	12.140.977.500,00			95	12.140.977.500,00
4	2	2	2.02	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan DPRD dalam satu tahun	set.DPRD	12 bulan	11.860.727.500,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	13.639.836.625,00
4	2	2	2.02	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut DPRD	Jumlah stel pengadaan pakaian Dinas dan Atribut DPRD	set.DPRD	175 stel	227.750.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	175 stel	261.912.500,00
4	2	2	2.02	3	Pelaksanaan Medical Check up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan general check up	set.DPRD	35 Orang	52.500.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	35 Orang	60.375.000,00
4	2	3			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana		90	16.449.775.956,00				18.917.242.349,00



4	2	3	2.01	Pembentukan Perda dan Peraturan Daerah	Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan daerah dala satu tahun		90	3.095.214.880,00			90	3.559.497.112,00	
4	2	3	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dalam satu tahun	set.DPRD	18 Ranperda	3.095.214.880,00	APBDKAB	RUTIN OPD	18 Ranperda	3.559.497.112,00
						Pembuatan naskah akademik Ranperda	set.DPRD	3 Naskah	0,00	APBDKAB	RUTIN OPD	3 Naskah	0,00
4	2	3	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Yang terlaksana		90	167.945.676,00			90	193.137.527,00	
4	2	3	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi	set.DPRD	30 orang	116.629.676,00	APBDKAB	RUTIN OPD	30 orang	134.124.127,00
4	2	3	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan	Jumlah triwulan laporan capaian TLH temuan	set.DPRD	3 Triwulan	25.658.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	3 Triwulan	29.506.700,00
4	2	3	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah triwulan laporan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	set.DPRD	3 Triwulan	25.658.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	3 Triwulan	29.506.700,00
4	2	3	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana		90	3.752.400.000,00					4.315.260.000,00
4	2	3	2.04	2	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah frekuensi kegiatan Bimtek DPRD dalam satu tahun	set.DPRD	6 kali	2.500.000.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	6 kali	2.875.000.000,00



4	2	3	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah bulan pembayaran untuk layanan informasi ke masyarakat	set.DPRD	12 Bulan	854.400.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 Bulan	982.560.000,00
						Jumlah bulan Pembayaran langganan media massa/ media cetak dan elektronik , biaya berita pariwisata, dan biaya peliputan media cetak dan elektronik	set.DPRD	12 Bulan	0,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 Bulan	0,00
						Jumlah jenis koran lokal, nasional, dan majalah untuk anggota DPRD dan sekretariat yang menjadi langganan dalam satu tahun	set.DPRD	3 jenis	0,00	APBDKAB	RUTIN OPD	3 jenis	0,00
						Cetak buletin berita DPRD dalam setahun	set.DPRD	12 edisi	0,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 edisi	0,00
4	2	3	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah bulan pembayaran honor Tim ahli AKD dalam satu tahun	set.DPRD	12 Bulan	120.000.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 Bulan	138.000.000,00
						Jumlah orang tim ahli AKD DPRD yang honorinya dibayarkan	set.DPRD	2 orang	0,00	APBDKAB	RUTIN OPD	2 orang	0,00
4	2	3	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah bulan pembayaran honor tenaga ahli fraksi dalam satu tahun	set.DPRD	12 bulan	278.000.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	12 bulan	319.700.000,00
						Jumlah orang tenaga ahli fraksi DPRD yang honorinya dibayarkan	set.DPRD	8 orang	0,00	APBDKAB	RUTIN OPD	8 orang	0,00



4	2	3	2.05	Penyerapan dan Menghimpun Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Menghimpun Asprasi Masyarakat yang terlaksana		95	1.317.720.000,00			95	1.515.378.000,00	
4	2	3	2.05	1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah frekuensi kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dalam satu tahun	set.DPRD	360 kali	417.725.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	360 kali	480.383.750,00
4	2	3	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dialog / hearing yang dilaksanakan dalam satu tahun	set.DPRD	15 kali	149.600.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	15 kali	172.040.000,00
4	2	3	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah terlaksana kegiatan reses anggota DPRD ke daerah pemilihan dalam satu tahun	set.DPRD	3 kali	750.395.000,00	APBDKAB	RUTIN OPD	3 kali	862.954.250,00
4	2	3	2.08	Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Fasilitas tugas Pimpinan DPRD dalam setahun		90	8.116.495.400,00				90	9.333.969.710,00
4	2	3	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah frekuensi kegiatan koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan anggota DPRD dalam satu tahun	set.DPRD	51 Kali	8.116.495.400,00	APBDKAB	RUTIN OPD	51 Kali	9.333.969.710,00
TOTAL									39.306.628.242,00				45.202.622.478,00





BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Namun demikian, acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 adalah Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 yang telah direvisi.

Renja Sekretariat DPRD memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berhasil tidaknya pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Sekretariat DPRD, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Sekretariat DPRD dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2021, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.



Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 disusun, dengan harapan semoga mampu meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang.

